

~~Phase~~

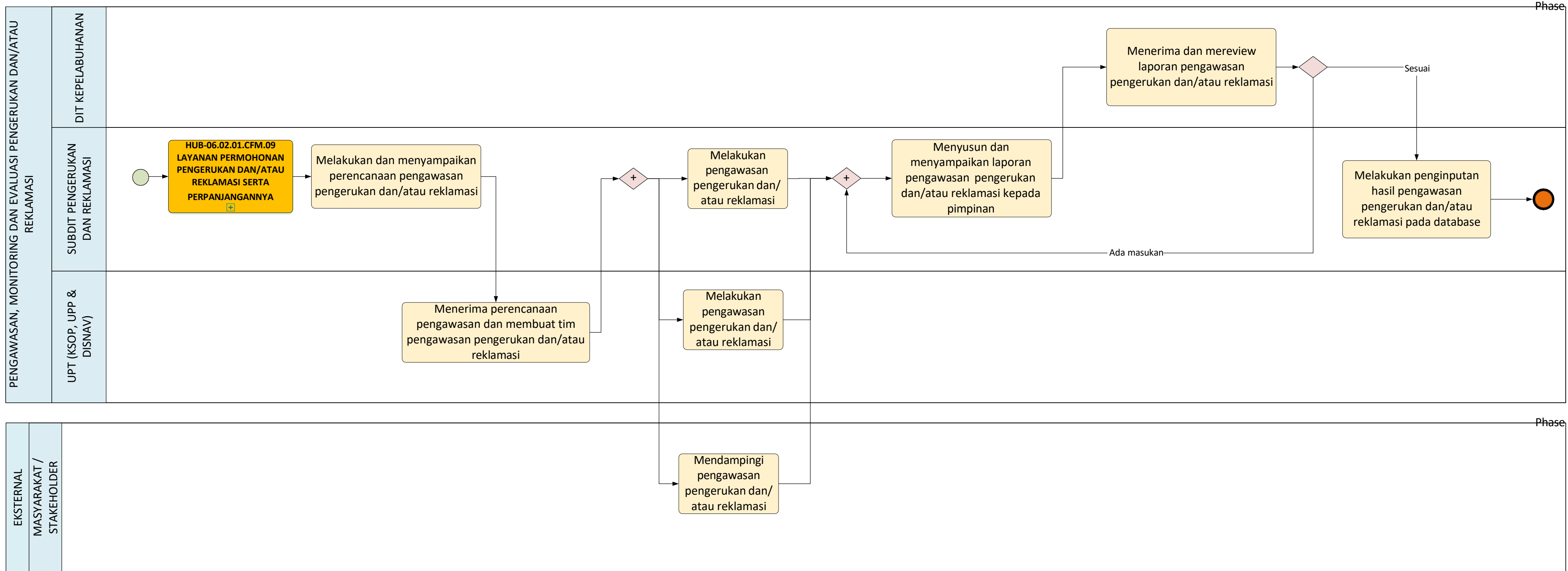


Direktur Kepelabuhanan,

- Muhammad Masyhud

Muhammad Masyhud
NIP 19700622 199803 1 001

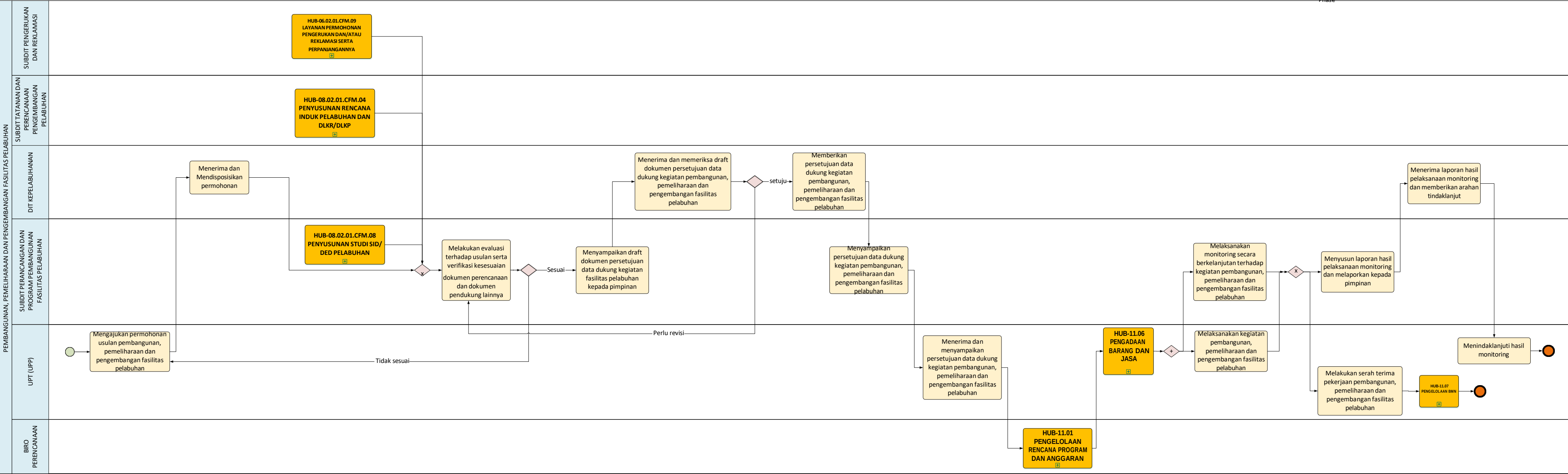
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pengerukan dan/atau Reklamasi

**Referensi :**

- Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran
- Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana diubah menjadi Permenhub Nomor PM 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi
- Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Direktur Kepelabuhanan,

Muhammad Masyhud
NIP 19700622 199803 1 001



Direktur Kepelabuhanan,

PENYUSUNAN STUDI SID/DED PELABUHAN	
MENTERI	DIT KEPELABUHAN
Memberikan arahan	Memberikan arahan
SUBDIT TATANAN DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PELABUHAN	Menerima dan Mendisposisikan permohonan
SUBDIT PERANCANGAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN	Menerima dan Mendisposisikan permohonan
KSOP UTAMA	Menerima dan Mendisposisikan permohonan
UPT TERKAIT	Menerima surat persetujuan hasil studi dan dokumen studi DED/SID

```

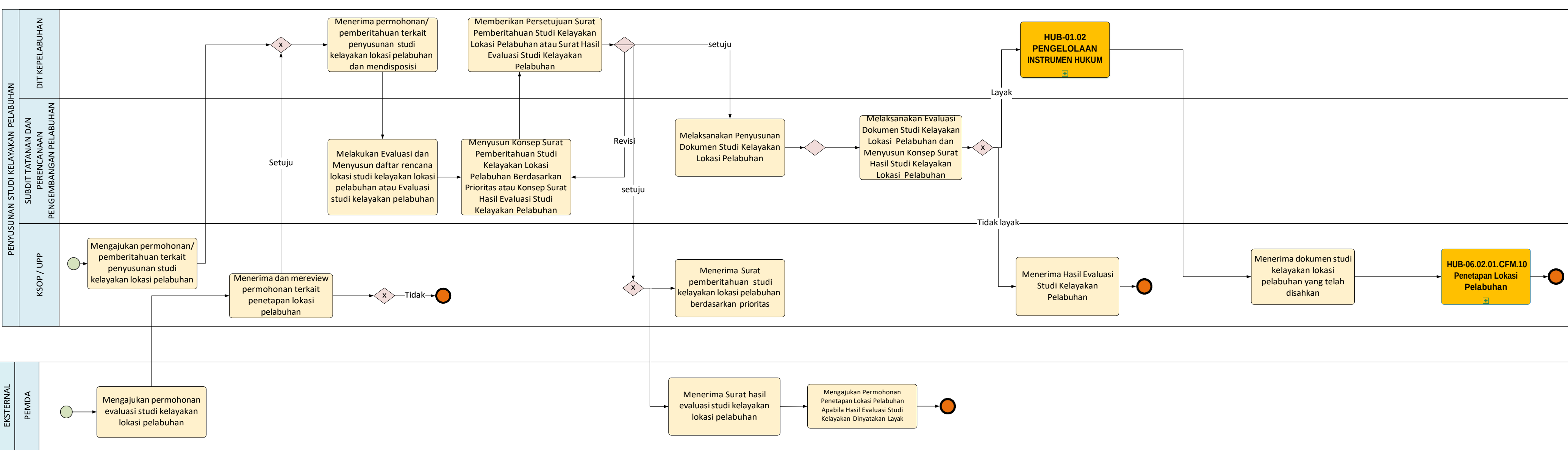
graph TD
    Start(( )) --> X1{X}
    X1 --> A[Mengajukan permohonan studi]
    A --> X2{X}
    X2 --> B[Menerima dan Mendisposisikan permohonan]
    B --> C[Menerima dan Mendisposisikan permohonan]
    C --> D[HUB-08.02.01.CFM.04  
PENYUSUNAN RENCANA  
INDUK PELABUHAN DAN  
DLKR/DLKP]
    D --> E{x}
    E --> F[Melakukan evaluasi awal]
    F --> G{ }
    G --> H[Prioritas]
    H --> I{X}
    I --> J[Melakukan penyusunan dokumen studi]
    J --> K{x}
    K --> L[Melakukan pembahasan draft dokumen studi]
    L --> M{x}
    M --> N[Menyusun draft surat persetujuan hasil studi DED/SID]
    N --> O{x}
    O --> P[Menerima dan menyampaikan draft surat persetujuan hasil studi DED/SID / draft Rekomtek hasil studi DED/SID]
    P --> Q[Menerima dan memeriksa draft surat persetujuan / Rekomtek hasil studi DED/SID]
    Q --> R{ }
    R --> S[Setuju]
    S --> T{x}
    T --> U[Menyampaikan surat persetujuan hasil studi dan dokumen studi DED/SID kepada UPT Terkait]
    T --> V[Menyampaikan Rekomtek hasil studi dan dokumen studi DED/SID kepada KSOP Utama]
    U --> W[Menerima surat persetujuan hasil studi dan dokumen studi DED/SID]
    V --> X[Ada masukan]
    X --> P
    W --> Y(( ))
    Z[Menerima surat persetujuan hasil studi dan dokumen studi DED/SID] --> Y
  
```

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan



Muhammad Masyhud
NIP 19700622 199803 1 001

PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PELABUHAN



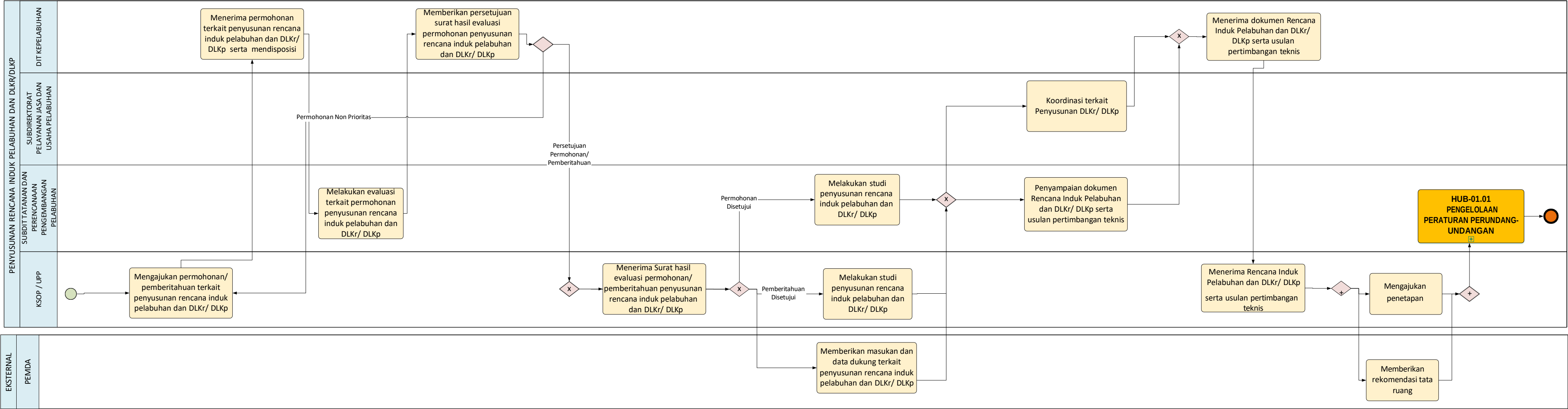
Referensi :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Direktur Kepelabuhanan,

Muhammad Masyhud
NIP 19700622 199803 1 001

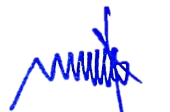
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN DAN DLKR/DLKP



Referensi :

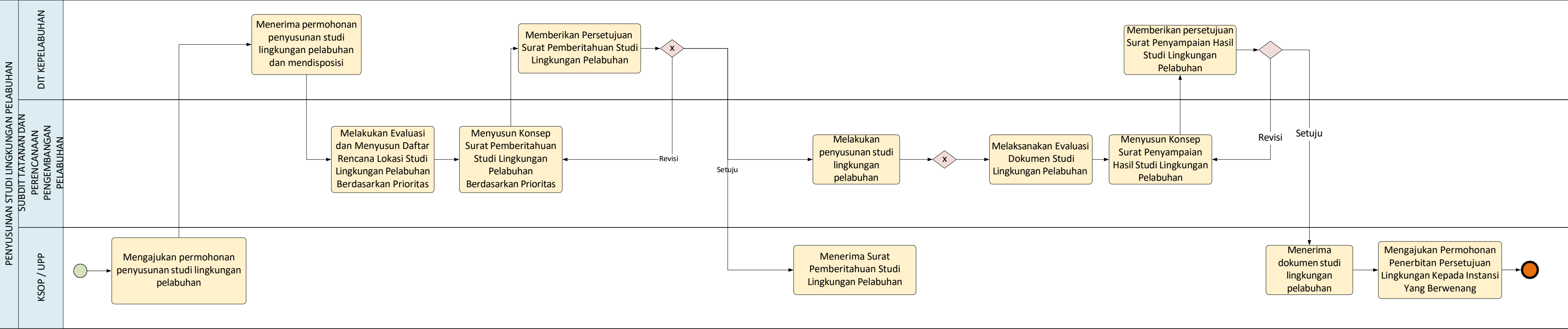
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Direktur Kepelabuhanan,



Muhammad Masyhud
NIP 19700622 199803 1 001

PENYUSUNAN STUDI LINGKUNGAN PELABUHAN



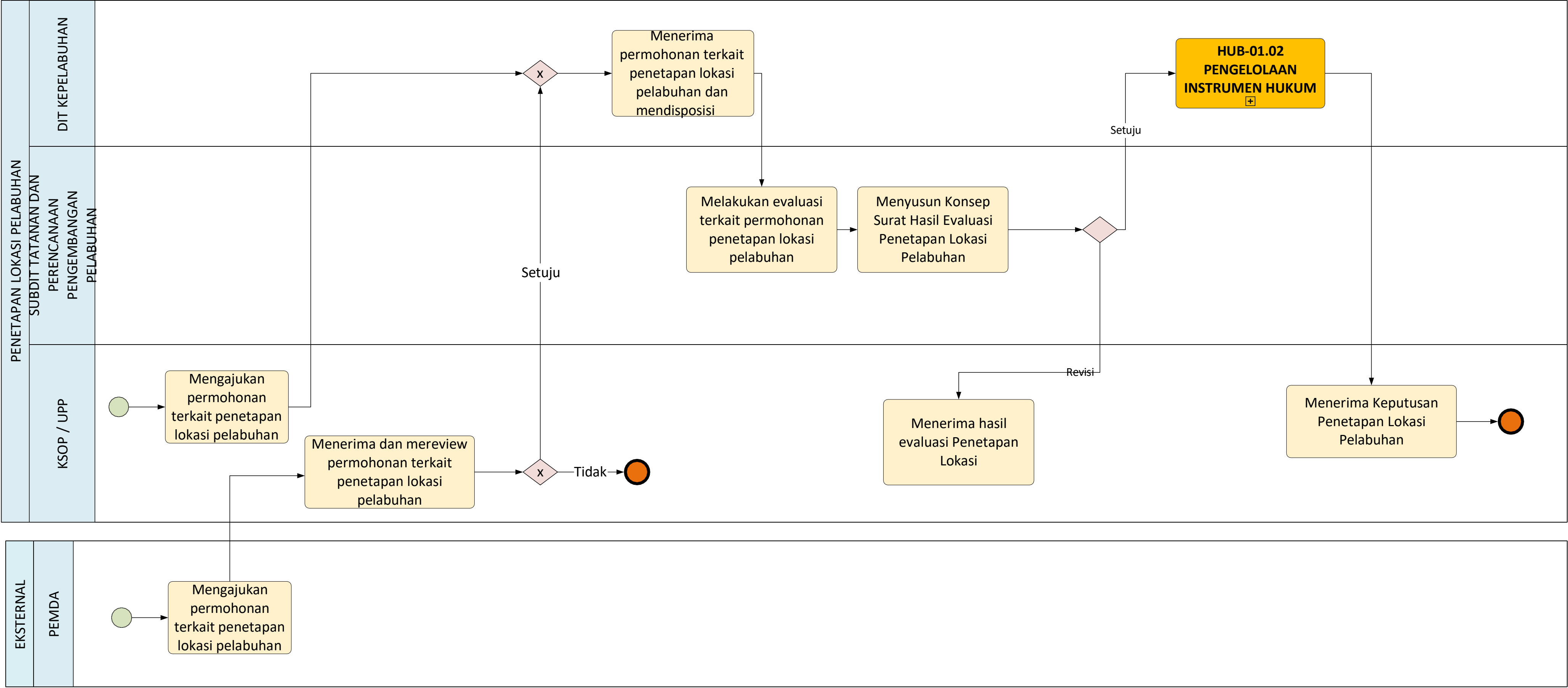
Referensi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL

Direktur Kepelabuhanan,

Muhammad Masyhud
NIP 19700622 19803 1 001

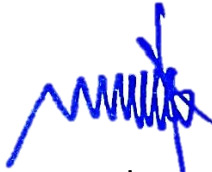
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN

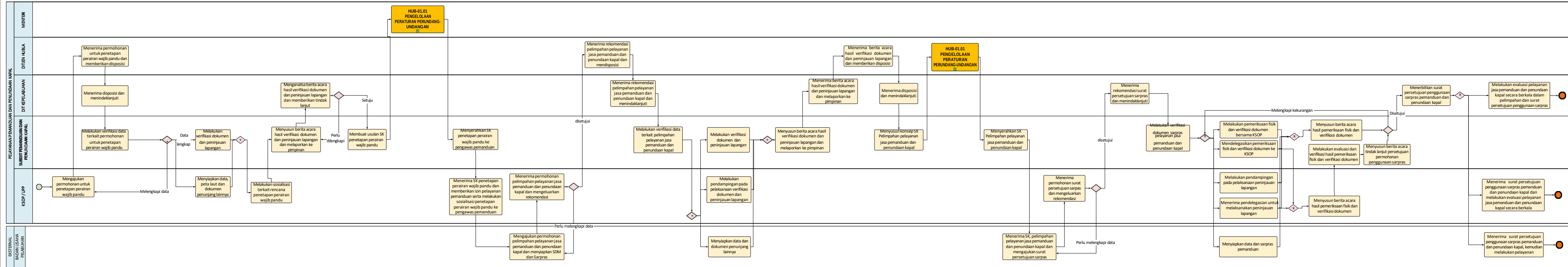


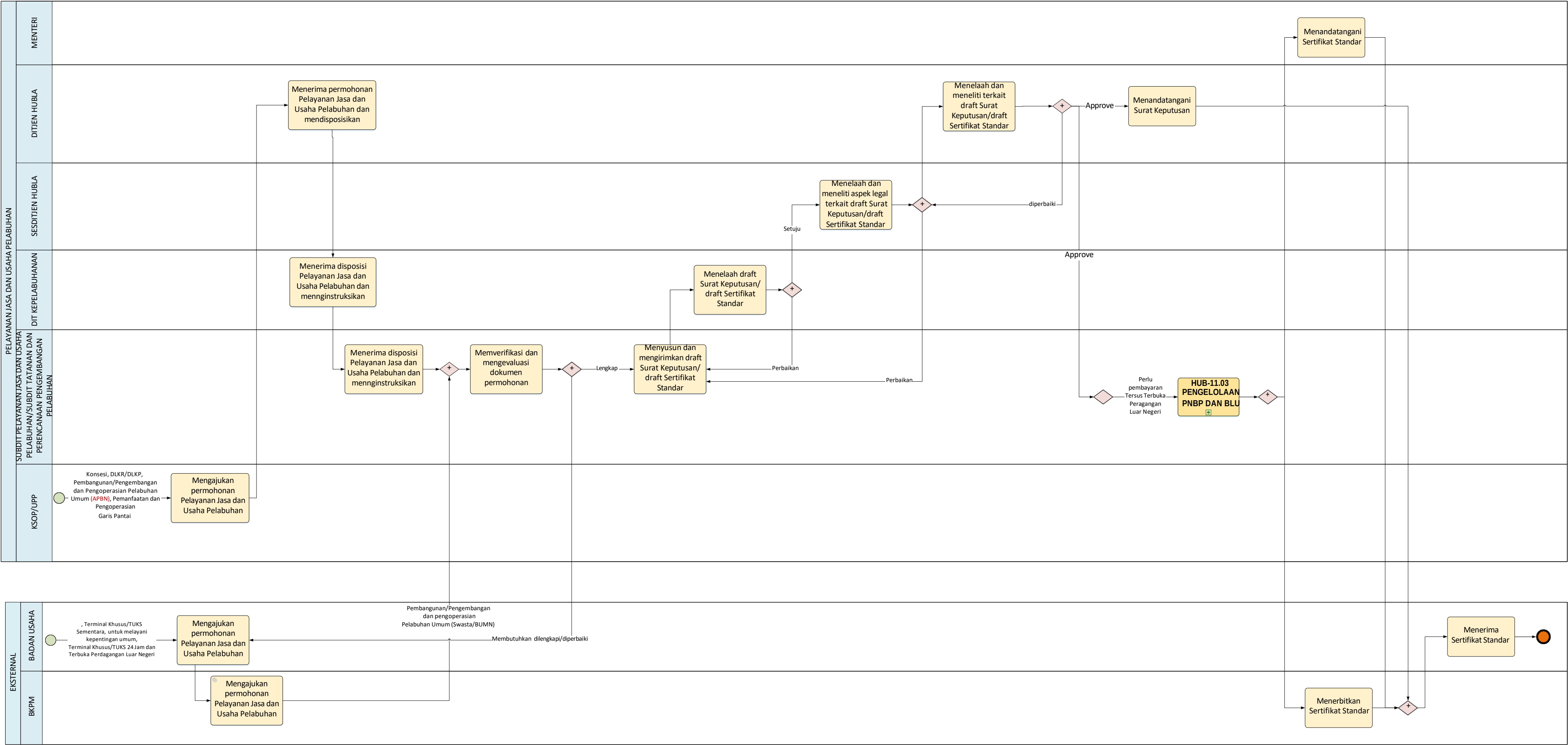
Referensi :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 217 Tahun 2022
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Direktur Kepelabuhanan,


Muhammad Masyhud
NIP 19700622 199803 1 001

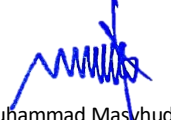


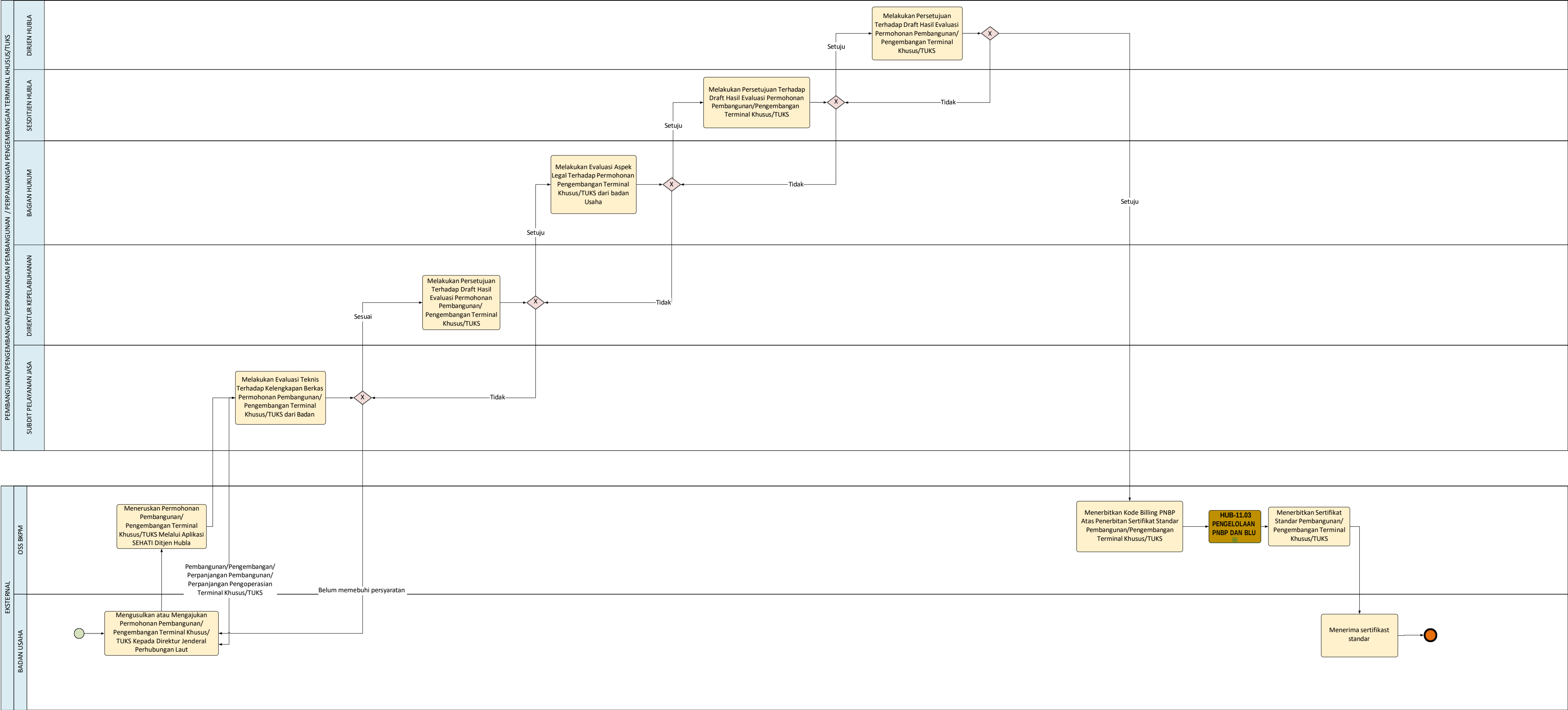


Referensi :

- Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2021 Tentang
- Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2021 Tentang
- Peraturan Menteri Perhubungan No 50 Tahun 2021 Tentang
- Peraturan Menteri Perhubungan No 52 Tahun 2021 Tentang
- Peraturan Menteri Perhubungan No 5 Tahun 2022 Tentang

Direktur Kepelabuhanan,


Muhammad Mas'hud
NIP 19700622 199803 1 001

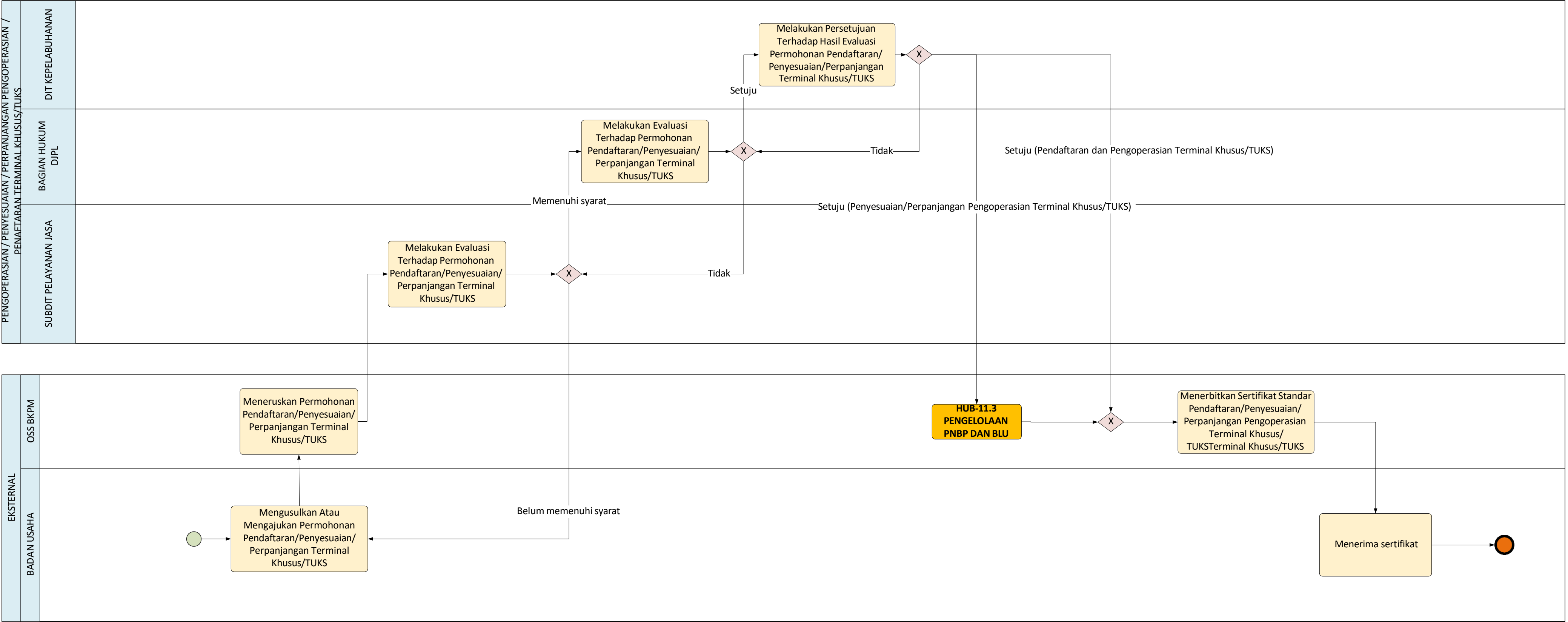


Direktur Kepelabuhanan,

Muhammad Mas'ud
NIP 19700622 19803 1 001

Referensi :
Peraturan

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.



Referensi :
Peraturan

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinnan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Transportasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

Direktur Kepelabuhanan,

Muhammad Masyhud
NIP 19700622 199803 1 001

